

BPK Resmikan Kantor Perwakilan Kalimantan Utara



www.kaltara.prokal.co

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Bahrullah Akbar, meresmikan Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (12/9/2019). Peresmian juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltara H. Udin Hianggio, B.Sc, unsur pimpinan daerah, para Bupati/Wali Kota, para pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Kaltara, serta para pejabat di lingkungan BPK dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

BPK akan berusaha untuk dapat memastikan bahwa tata kelola keuangan daerah di Kaltara dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Untuk menjalankan kegiatannya, BPK Perwakilan Kaltara menggunakan gedung dari eks Dinas Kesehatan Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan yang berada di Jalan Pulau Irian Nomor 12, Tarakan Tengah dengan cara pinjam pakai.

Seiring berjalannya waktu, jumlah pegawai terus bertambah, sementara sarana dan prasarana di Kantor BPK Perwakilan Kaltara dirasa belum ideal guna memperlancar pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, kebutuhan gedung yang representatif dan ideal untuk mendukung kinerja para pegawai mutlak diperlukan.

Wakil Ketua BPK RI berpesan agar gedung kantor tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sinergi antara BPK dengan para pemilik kepentingan dengan tetap berpegang teguh kepada independensi, integritas, dan profesionalisme.

Selama kurun waktu satu tahun terakhir, telah terjadi peningkatan tata kelola keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Utara yang ditandai dengan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2018 untuk empat Pemerintah Daerah, dan dua Pemerintah Daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dibandingkan hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2017 dimana hanya tiga Pemerintah Daerah memperoleh opini WTP.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan. Untuk itu diharapkan Rekomendasi atas Hasil Pemeriksaan BPK dapat segera ditindaklanjuti. Tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dicerminkan pula dari seberapa jauh rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut telah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Rata-rata Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara yang telah sesuai dengan rekomendasi per Semester I Tahun 2019 adalah sebesar 80,88 persen.

Sumber Berita:

- Benuanta.co.id; Miliki Gedung Baru Motivasi dan Semangat BPK Kaltara Diharapkan Meningkatkan; Kamis 12 September 2019;
- Kaltara.prokal.co; Kantor Baru, Motivasi Pegawai BPK Kaltara; Kamis, 12 September 2019; dan
- Kaltim.tribunnews.com; BPK Kaltara Punya Kantor Baru, Wakil Ketua BPK Berharap Semangat dan Energi Karyawan Meningkatkan; Jumat 13 September 2019.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

- Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
- BPK berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Pemeriksaan BPK mencakup Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.